JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

Transformasi Demokrasi Indonesia: Menuju Keberlanjutan Politik yang Inklusif dan Partisipatif

Aqilla Zati Bayani [a, 1*], Maharani Awalia Gempita [a, 2], Romero Wimala Heriaji [a, 3] Ziyad Nabil Al-Ghifari [a, 4]

[a] Institut Teknologi Bandung, Indonesia

[1]13723033@mahasiswa.itb.ac.id*; [2]13723057@mahasiswa.itb.ac.id; [3]13723044@mahasiswa.itb.ac.id ; [4]13723024@mahasiswa.itb.ac.id
*korespondensi penulis

Informasi Artikel
Received:
16/01/2025
Accepted:
26/04/2025

ABSTRAK

Demokrasi Indonesia terus berkembang sejak era reformasi, mengalami dinamika yang sangat kompleks di tengah globalisasi dan tantangan domestik. Paper ini meneliti transformasi demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan peran kelembagaan negara dalam memastikan inklusivitas dan partisipasi aktif. Penelitian ini menyoroti bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada pemilihan yang adil, tetapi juga pada peningkatan kualitas keterlibatan publik dan penguatan peran institusi untuk menegakkan transparansi serta akuntabilitas. Penelitian ini juga mengamati faktor-faktor eksternal seperti pengaruh media digital dan respons terhadap krisis lingkungan yang berperan dalam mendorong paradigma demokrasi baru. Dengan pendekatan multidisiplin, penelitian ini menawarkan rekomendasi bagi kebijakan publik yang mendukung demokrasi berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini bertujuan menjadi kontribusi kritis dalam memperdalam pemahaman tentang penguatan demokrasi di Indonesia dan menyarankan strategi untuk memajukan sistem politik yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, sehingga menghasilkan tata kelola yang berdaya saing serta responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Kata kunci: Demokrasi Indonesia, Transformasi Demokrasi, Partisipasi Politik

ABSTRACT

Indonesia's democracy has continued to evolve since the reform era, experiencing highly complex dynamics amidst globalization and domestic challenges. This paper examines the transformation of democracy in Indonesia, focusing on public engagement in the political process and the role of state institutions in ensuring inclusivity and active participation. The study highlights that a healthy democracy relies not only on fair elections but also on improving the quality of public involvement and strengthening institutional roles to uphold transparency and accountability. It also observes external factors such as the influence of digital media and responses to environmental crises that contribute to driving new democratic paradigms. Using a multidisciplinary approach, this research offers recommendations for public policies that support sustainable and inclusive democracy. It aims to provide a critical contribution to deepening the understanding of strengthening democracy in Indonesia and suggests strategies for advancing a political system capable of adapting to changing times, thereby fostering governance that is competitive and responsive to the people's needs.

Keywords: Indonesian Democracy, Democratic Transformation, Political Participation

Copyright © 2025 (Aqilla Zati, Maharani Awalia, Romero Heriarji, Ziyad Nabil). All Right Reserved

JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

How to Cite: Zati, A., Awalia, M., Heriarji, R., and Nabil, Z. (2020). **Transformasi Demokrasi Indonesia: Menuju Keberlanjutan Politik yang Inklusif dan Partisipatif**. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(2), 1-11. DOI: 10.21009/jimd.v24i2.53154

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendahuluan mencakup latar belakang dari isu atau permasalahan serta urgensi, rasionalisasi, dan Sejak era reformasi, transformasi demokrasi di Indonesia terus menjadi perhatian utama dalam berbagai kajian politik dan sosial. Demokrasi di Indonesia menunjukkan perpaduan unik antara nilai-nilai tradisional yang berasal dari budaya lokal dengan prinsip-prinsip modern yang diadopsi dari sistem demokrasi global. Proses ini mencerminkan upaya Indonesia untuk membangun sistem politik yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki tantangan unik dalam menjaga keseimbangan antara pluralisme dan stabilitas politik. Pluralisme, sebagaimana dicatat oleh Sundhaussen (1992), merupakan elemen inti demokrasi yang memungkinkan keberagaman terintegrasi ke dalam pengambilan keputusan politik. Namun, Neher (1992) menunjukkan bahwa stabilitas sistem tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, meskipun dalam kenyataannya, Indonesia sering menghadapi kendala berupa lemahnya implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik.

Penelitian kontemporer memberikan wawasan lebih lanjut tentang kemajuan dan tantangan demokrasi di Indonesia. Data dari Mangkurat dan Mirajiah (2021) menunjukkan adanya peningkatan skor kebebasan sipil Indonesia, sebuah indikator positif yang mencerminkan keberhasilan reformasi kebijakan publik. Namun, kualitas budaya politik dan fungsi pemerintahan masih menjadi tantangan utama. Misalnya, meskipun proses pemilu dinilai transparan, seringkali ditemukan isu terkait netralitas institusi negara dan partisipasi publik yang belum merata.

Tantangan ini semakin diperburuk oleh meningkatnya intoleransi sosial dan radikalisme, sebagaimana dilaporkan oleh Wahid Foundation dan Setara Institute. Penelitian menunjukkan bahwa intoleransi berbasis agama dan ideologi ekstrem menjadi ancaman bagi kohesi sosial dan demokrasi itu sendiri. Sebagai contoh, 59,9% responden dalam survei Wahid Foundation menyatakan adanya kelompok tertentu yang mereka tidak ingin libatkan dalam proses pemerintahan.

Masalah-masalah ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam berbagai aspek demokrasi, Indonesia masih menghadapi hambatan signifikan dalam membangun sistem politik yang sepenuhnya inklusif dan berkelanjutan (Muhammad, Firdaus, & Aci, 2023). Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pendekatan multidisiplin dalam memperkuat transformasi demokrasi Indonesia.

Artikel ini secara khusus akan mengkaji langkah-langkah untuk meningkatkan partisipasi publik, akuntabilitas kelembagaan, serta memanfaatkan media digital sebagai alat untuk memperkuat budaya politik yang inklusif (Juantara, 2023). Selain itu, tulisan ini juga akan membahas bagaimana sistem demokrasi dapat merespons krisis lingkungan dan perubahan sosial sebagai bagian dari strategi keberlanjutan di masa depan.

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan studi literatur untuk mengkaji transformasi demokrasi di Indonesia menuju politik yang inklusif dan partisipatif. Subjek penelitian meliputi karya ilmiah, artikel jurnal, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema demokrasi Indonesia. Data diperoleh melalui telaah literatur secara mendalam, dengan fokus pada sumber-sumber yang memiliki kredibilitas dan relevansi tinggi, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk menemukan tema dan pola yang signifikan. Proses analisis dilakukan secara cermat untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai dinamika demokrasi yang menjadi fokus kajian.

Hasil dan Pembahasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi berarti bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat.

Demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dan pengambilan keputusan dilakukan oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih (anugrahdwi, 2023).

Dapat dilihat dari pengertian demokrasi bahwa tujuan adanya sistem demokrasi adalah untuk mencapai pilihan berdasarkan keinginan dari mayoritas masyarakat yang diharapkan akan menguntungkan masyarakat.

Demokrasi Indonesia telah mengalami transformasi signifikan sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Proses ini dimulai dari masa revolusi, dilanjutkan dengan berbagai bentuk pemerintahan seperti Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, hingga Orde Baru. Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai perubahan penting dengan pengenalan pemilihan umum yang lebih demokratis dan kebebasan pers yang lebih besar (Manurung, Zee, Nathanael, & Ernando, 2022).

Transformasi demokrasi di Indonesia sejak Reformasi 1998 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemilihan umum yang lebih transparan dan partisipatif telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Misalnya, pemilihan presiden langsung pada tahun 2004 merupakan tonggak penting yang mencerminkan kemajuan ini. Selain itu, desentralisasi kekuasaan ke daerah memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas. Menurut laporan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 mencapai 81%, yang menunjukkan keaktifan masyarakat dalam proses demokrasi (KPU, 2019).

Meningkatnya peran perempuan juga menunjukkan inklusi politik Indonesia. Dengan kuota 30% perempuan untuk daftar calon legislatif, perempuan sekarang dapat lebih aktif terlibat dalam politik. Data DPR menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif meningkat dari pemilu ke pemilu. Menurut DPR (2019), inklusivitas politik telah meningkat karena 20,5% kursi DPR diduduki oleh perempuan pada pemilu 2019 (DPR, 2019).

Proses transformasi demokrasi Indonesia menunjukkan perubahan yang dinamis, dengan masyarakat menjadi semakin terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Masyarakat sipil telah berpartisipasi secara aktif dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan jumlah organisasi non-pemerintah (LSM) yang melindungi kelompok marginal dan mengawasi kebijakan publik. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa demokrasi yang baik memerlukan pemilihan umum yang adil dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam proses politik.

Meskipun telah terjadi kemajuan, tantangan dalam konsolidasi demokrasi masih ada. Beberapa tantangan tersebut mencakup: Korupsi, masih tingginya tingkat korupsi di kalangan pejabat publik yang mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Partisipasi politik, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, terutama di kalangan kelompok marginal. Terakhir adalah masih adanya keterbatasan ruang sipil, meskipun kebebasan berpendapat meningkat, masih ada pembatasan terhadap organisasi masyarakat sipil dan media.

Korupsi adalah masalah serius yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Korupsi dapat mencakup suap-menyuap, penyelewengan dana kampanye, dan praktik korup lainnya yang merusak integritas pemilihan.

Ketika masyarakat melihat adanya korupsi dalam pemilihan umum, mereka mungkin meragukan keberhasilan proses tersebut. Ini dapat mengurangi motivasi untuk berpartisipasi (Fadillah et al., 2022).

Korupsi dalam pemilihan umum dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam akses dan pengaruh politik. Calon yang memiliki sumber daya finansial yang lebih besar mungkin memiliki keunggulan dalam kampanye, yang menghambat persaingan yang adil. Pemilihan yang dicemari oleh korupsi kehilangan legitimasi di mata masyarakat. Warga negara mungkin merasa bahwa proses tersebut tidak mewakili kepentingan mereka.

Selain partisipasi pemilih, partisipasi dalam pemilihan umum juga dapat diukur melalui tingkat partisipasi calon politik. Ini mencakup jumlah calon yang mengajukan diri dalam pemilihan dan kompetisi yang mereka hadapi. Tingkat persaingan dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses politik dengan cara yang lebih aktif, seperti menjadi calon.

Budaya politik suatu negara berperan dalam menentukan tingkat partisipasi. Jika budaya politik menghargai keterlibatan politik aktif, maka partisipasi masyarakat kemungkinan akan lebih tinggi. Sebaliknya, dalam budaya yang lebih apatis terhadap politik, partisipasi mungkin lebih rendah (Rahmatullah & Nurhakim, 2024).

Selain itu, polarisasi politik merupakan hambatan lain bagi kelangsungan demokrasi. Konflik politik dapat menyebabkan konflik sosial dan mengancam stabilitas negara. Misalnya, beberapa daerah mengalami kerusuhan akibat konflik antara pendukung calon presiden yang berbeda selama pemilu 2019. Laporan dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) menyatakan bahwa penggunaan media sosial untuk menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian meningkatkan polarisasi politik (IPAC, 2019).

Sebagai ideologi negara, pancasila menjadi dasar untuk mewujudkan cita-cita bersama, menghormati perbedaan, dan mencapai keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian. Kesadaran ini membantu masyarakat Indonesia mempertahankan stabilitas politik dan memperkuat identitas nasional dalam kerangka demokrasi inklusif (Oktavianingrum, An'nisaa, & Syakhila, 2023).

Pancasila menjadi pedoman dan pandangan hidup telah menjadikan bangsa Indonesia dapat memecahkan berbagai macam persoalan politik, ekonomi, budaya dan lain-lain yang muncul dalam dinamika perkembangan masyarakat yang semakin maju. Indonesia sudah seharusnya mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai tersebut sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan cita-cita bersama (Kardiman, 2024).

Fenomena yang lebih baru, terutama dengan berkembangnya media sosial, adalah munculnya eksklusi yang dilakukan oleh aktor non-negara. Eksklusi yang dilakukan oleh aktor negara adalah tindakan membatasi akses warga negara ke media sosial; sedangkan, eksklusi di antara kelompok warga negara adalah membatasi suara minoritas dan pandangan yang berbeda. Sebagai contoh, di Malaysia kelompok konservatif dan kelompok sayap kanan telah menggunakan media sosial untuk mencemooh, meremehkan, dan menyerang individu dan kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi pandangan dunia yang lebih liberal terhadap beberapa isu (Prapto, 2020).

Dengan memberikan informasi yang akurat dan objektif, media massa sangat penting untuk menjaga demokrasi yang baik. Namun, dengan munculnya berita palsu dan disinformasi di media sosial, masalah muncul. Media juga harus tetap independen dan tidak terpengaruh oleh politik. Sebuah laporan oleh Reporters Without Borders menyatakan bahwa sejumlah kasus intimidasi terhadap jurnalis telah terjadi di Indonesia, yang menunjukkan bahwa kebebasan pers di negara tersebut sedang diuji (Reporters Without Borders, 2020).

Transformasi demokrasi di Indonesia menunjukkan perjalanan panjang yang dipenuhi dengan tantangan dan harapan. Dari awal kemerdekaan hingga era reformasi, Indonesia telah berusaha untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih adil dan demokratis. Namun, tantangan seperti korupsi dan rendahnya partisipasi politik masih menjadi hambatan utama.

Faktor eksternal yang mendorong paradigma demokrasi baru di Indonesia adalah krisis lingkungan. Kesadaran masyarakat terhadap masalah seperti pencemaran lingkungan, deforestasi, dan perubahan iklim telah meningkat. Banyak organisasi masyarakat sipil sekarang berkonsentrasi pada advokasi lingkungan, mendorong pemerintah untuk menangani masalah lingkungan dengan cara yang lebih bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam masalah lingkungan dapat meningkatkan demokrasi dengan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Untuk mencapai demokrasi yang benar-benar inklusif, diperlukan reformasi kebijakan yang mendukung partisipasi semua kelompok masyarakat. Reformasi ini termasuk penyediaan akses pendidikan politik, perlindungan hak-hak minoritas, dan peningkatan transparansi dalam proses pemilihan. Kajian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa partisipasi politik dapat ditingkatkan melalui pendidikan politik yang inklusif dan program-program pemberdayaan masyarakat (LIPI, 2021).

Keberlanjutan politik yang inklusif dan partisipatif tidak hanya bergantung pada reformasi struktural tetapi juga pada perubahan budaya politik. Masyarakat perlu diberdayakan untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan politik yang menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga mereka memahami pentingnya suara mereka dalam menentukan arah kebijakan publik.

Secara filosofis, tingkat partisipasi masyarakat sesungguhnya sangat dipengaruhi oleh sistem nilai atau budaya dan sikap-sikap pelaku (*stakeholder*) pembangunan yang dominan di suatu daerah, apakah berlangsung secara demokratis, atau secara otoriter. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat tidak dapat secara mudah kita jelaskan, mengapa partisipasi suatu masyarakat relatif berhasil di suatu atau beberapa tempat (daerah), tetapi dapat juga menjadi sangat berbahaya ditempat lainnya.

Secara kuantitas, semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat suatu negara mengikuti dan memahami juga melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, semakin

rendah partisipasi politik maka pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi serta minat terhadap masalah dan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Sebab itu, partisipasi rakyat dalam pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk ditilik (Failaq & Madjid, 2022).
Semakin tinggi tingkat penyerahan kekuasaan ke tangan masyarakat adalah semakin baik, dan paling tidak pelibatan peran serta masyarakat dapat mencakup partisipasi dalam bentuk sosialisasi informasi, penentraman, kemitraan, pelimpahan kewenangan untuk mengambil keputusan, dan fungsi kontrol. Ini semua hanya dapat berlangsung dengan harmonis manakala terbentuk suatu sistem nilai dan budaya, sistem bermasyarakat, dan bahkan sistem berpolitik-bernegara yang demokratis.

Lebih jauh lagi, penting bagi pemerintah untuk menciptakan ruang bagi dialog antara berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan perempuan, untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, transformasi demokrasi Indonesia dapat menuju keberlanjutan yang lebih baik dan menciptakan sistem politik yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.

Kesimpulan

Transformasi demokrasi di Indonesia mencerminkan upaya signifikan untuk menciptakan sistem politik yang inklusif dan partisipatif, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti korupsi, rendahnya partisipasi politik, intoleransi sosial, dan polarisasi politik. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan demokrasi bergantung pada reformasi kebijakan yang meningkatkan pendidikan politik, transparansi kelembagaan, serta perlindungan hak minoritas. Inovasi dalam memanfaatkan media digital juga menjadi peluang besar untuk memperkuat budaya politik yang inklusif. Keberlanjutan demokrasi di Indonesia memerlukan penguatan nilai-nilai demokratis yang berakar pada budaya lokal, diiringi dengan penerapan strategi kebijakan yang responsif terhadap krisis lingkungan dan perubahan sosial. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model pendidikan politik yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi Indonesia.

Referensi

Alamin, Z., & Missouri, R. (2023). PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PENDUKUNG PEMBELAJARAN AGAMA ISLAM DI ERA DIGITAL. *Tajdid : Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, *7*(1), 84–91. https://doi.org/10.52266/tadjid.v7i1.1769

Dwi, A. (2023, September 12). *Demokrasi: Pengertian, Sejarah dan Contohnya - UMSU Kampus Terbaik*. Pascasarjana UMSU. https://pascasarjana.umsu.ac.id/demokrasi-pengertian-sejarah-dan-contohnya/

Failaq, M. R., & Madjid, M. A. (2022). Tinjauan Demokrasi Partisipatif dan Peluang Penerapan E-Vote pada Pemilu 2024. Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik, 74-81.

Juantara, B. (2023). Implementasi Nilai Demokrasi dalam Inklusi Politik Rakyat Berbasis Digital. Bureaucracy Journal, 1462-1464.

Kardiman, T. (2024). Sila Ketiga Pancasila Fondasi Dalam Menyukseskan Demokrasi Inklusif (Sebagai Upaya Menangkal Politik Identitas). Souvereignty, 16-29.

Manurung, C. E., Zee, C., Nathanael, N., & Ernando, R. (2022). Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dan Relevansinya untuk Kehidupan di Tahun 2022. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral , 6-8.

Muhammad, & Agritama, M. (2022). Tinjauan Demokrasi Partisipatif dan Peluang Penerapan E-Vote pada Pemilu 2024. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, *2*(1). https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2802

Muhammad, K., Firdaus, S., & Aci, M. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. Souvereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasiona, 358-360.

None , Y., Sri Aisyah , A., Mulia, R., & None Ridwal , T. (2024). Pendidikan Multikultural dan Inklusi. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, *6*(1), 130–142. https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.1355

Rahmatullah, R., Fadli, Y., & Nurhakim, N. (2024). DISKURSUS TENTANG KONSEP DEMOKRASI, PARTISIPASI POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, *9*(2), 185. https://doi.org/10.35329/mitzal.v9i2.4957

RI, S. D. (2024). *Parlementaria Terkini - JDIH SETJEN DPR*. Dpr.go.id. https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/51988/t/javascript

Syakhila, H. D. S., Oktavianingrum, V. P., & An'nisaa, R. (2023). Demokrasi Yang Berkualitas: Peran Mahasiswa Dan Generasi Milenial Dalam Pengawasan Pemilu 2024. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, *9*(2), 55–61. https://doi.org/10.33319/yume.v9i2.240